

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan didalam hokum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.¹. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat digolongkan dala tiga golongan pkok yaitu golongan teori pembalasan, golonngan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

¹ Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hal.01

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.² Teori pembalasan ini menyetujui pembedaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum* ” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.³

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:⁴

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.

² Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.105

³ Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

⁴ *ibid*

- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.⁵

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :⁶

- a. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

- b. Untuk memperbaiki;

⁵ Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

⁶ *Ibid* hal:142

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah terdapat pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakutkan – menakutkan. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :⁷

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

⁷ Dalam Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.106-107

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁸ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁹

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :¹⁰

“ makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tat tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar

⁸ Niniek Suparni, SH. 2007. “ Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

⁹ Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. “ Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

¹⁰ Dalam Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. “ Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yng mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dlam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang – undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.¹¹

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efefitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.¹²

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

¹¹ *Ibid* hlm.163

¹² *Ibid* hlm.164

3. Jenis – Jenis Pemidanaan

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.¹³ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:Pidana terdiri atas:¹⁴

- a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*) :
 - 1. Pidana Mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Pidana denda
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) :
 - 1. Pencabutan hak – hak tertentu
 - 2. Perampasan barang – barang tertentu
 - 3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman – hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok.¹⁵

B. Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

¹³ M Najih SH ,2014, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Setara Press, Malang, hlm.177

¹⁴ Pasal 10 , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁵ Ibid, hlm.178-179

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses *Therapoutie* yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.¹⁶

Jadi Pemasyarakatan yaitu suatu kegiatan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dan menurut saya pemasyarakatan itu sebuah sistem untuk membina seseorang penjahat atau seorang yang telah melakukan tindak pidana yang tujuannya adalah untuk memberikan efek jera atau merubah seorang penjahat tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya..

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya didalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Pemasyarakatan adalah suatu proses normal, tujuannya adalah :

- a. Berusaha agar narapidana atau anak didik tidak melanggar hukum lagi di masyarakat kelak
- b. Menjadi narapidana atau anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan
- c. Membantu narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.¹⁷

2. Sistem Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana

- a. Sistem Pemasyarakatan

¹⁶ Bambang Purnomo, 1985, "*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*", Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 125.

¹⁷ R. Achmad S. Soemadi Pradja, 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bina Cipta Bandung, hal

Istilah sistem menurut Anatol Rapport sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdusallam dan DPMSitompul memberikan pengertiannya, bahwa :¹⁸

“Sistem adalah keseluruhan yang berfungsi sebagai satu kebulatan yang saling ketergantungan diantara bagian tersebut.”

Secara sederhana sistem ini merupakan sekumpulan Unsur - unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi. Richard A. Johnson dan Russel L. Ackoff sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo menunjukan bahwa apa yang dinamakan sistem itu sulit untuk dirumuskan, karena dapat menyangkut berbagai lapangan kegiatan serta faktor - faktor yang saling berhubungan satu sama lain yang terorganisasi dalam satu kesatuan guna mencapai hasil tertentu. Suatu sistem memiliki nilai elemen - elemen yang mengadakan hubungan interaksi dalam proses ke arah hasil tertentu. Sedangkan Parmono Atmadi mengemukakan pengertian suatu sistem dalam pendidikan perguruan tinggi adalah suatu susunan elemen - elemen atau komponen yang berinteraksi dengan membentuk satu kesatuan yang integral.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai instansi terakhir didalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar - benar terbukti bersalah atau tidak. Perlakuan terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan hak - hak narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan. Istilah sistem peradilan pidana dikemukakan oleh Abdussalam dan DPM Sitompul bahwa :¹⁹

¹⁸ Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, , hlm. 5.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 5-6

“*Criminal justice system* merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara subsistem polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga (lapas).”

Dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Kata dari agar menjadi manusia seutuhnya dimaksudkan untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terdapat fungsi sistem pemasyarakatan yaitu untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Perlakuan terhadap narapidana merupakan hal yang sangat penting melakukan pembinaan terhadap seseorang. Situasi lingkungan sekitar menjadi faktor penentu keberhasilan. Hukum bertugas untuk memberi pengayoman agar cita - cita seluruh bangsa dapat tercapai dan terpelihara. Khusus mengenai perlakuan terhadap narapidana, tidak saja masyarakat diayomi dari penanggulangan perbuatan jahat oleh terpidana tetapi juga agar orang yang telah tersesat tersebut juga mendapatkan

pengayoman melalui pembinaan dan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab bagi masyarakat dan Negara. Berdasarkan gagasan tersebut kemudian dirumuskan menjadi prinsip pemasyarakatan, yaitu :²⁰

- a. Pemberian pengayoman kepada warga binaan agar mereka kembali ke masyarakat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;
- b. Pemberian bimbingan dan bukan penyiksaan agar mereka bertaubat dan bertaqwa;
- c. Penjatuhan pidana bukan balas dendam oleh Negara
- d. Negara tidak boleh membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan, mereka tidak dijatuhkan dan dikesampingkan dari pergaulan dan kegiatan masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada mereka tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu;
- g. Perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan yang diberikan kepada mereka harus berdasarkan Pancasila;
- h. Sebagai manusia yang tersesat, mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
- i. Satu - satu derita yang dialami adalah dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan, dalam arti kepada narapidana yang bersangkutan tidak boleh dikenakan penderitaan tambahan, seperti penyiksaan fisik;
- j. Penyediaan sarana untuk dapat mendukung fungsi preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

b. Pembinaan Narapidana

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya didalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah di programkan.

²⁰ Ditjen Pemasyarakatan, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Kumpulan Tulisan Baharudin Surjobrotom, Jakarta, 2002, hlm. 45.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.²¹

Pembinaan narapidana adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan ke warga binaan untuk mendidik / mengajarkan para warga binaan untuk menjadi lebih baik dan bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat. Pembinaan narapidana ini bertujuan untuk membentuk kepribadian, keterampilan, dan pola kehidupan narapidana agar menjadi lebih baik dan tidak terjerumus kembali ke dalam hal – hal yang melanggar peraturan atau hukum di negara ini.

Satu hal yang harus selalu diingat bahwa tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik dalam rangka pembinaan atau lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh bahrudin Surjobroto: Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan

²¹ Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Semarang, hal.38.

memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara.²²

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.²³

Jadi dalam melakukan pembinaan lembaga pemasyrakatan harus memperhatikan sitem dari pembinaan yaitu Didalam sistem pembinaan lembaga pemasyrakatan sudah di jelaskan didalam UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Bab II tentang pembinaan **Pasal 5** “Sistem pembinaan pemasyrakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”²⁴

²² Bahrudin Surjobroto, 1991, Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan, Departemen kehakiman RI, jakarta, hal.5.

²³ Erina Suhestia Ningtyas, “Pelaksanaan Program Pembinaan Napi Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia” <https://media.neliti.com/media/publications/75916> Diakses tgl 10/15/2018 jam 10 .49

²⁴ UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 5

Adapun penjelasan dari Pasal 5 UU Pemasyarakatan tentang sistem pembinaan terhadap narapidana harus yaitu :

a. Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

c. Pendidikan dan pembinaan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembinaan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan keroganian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu - satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olah raga dan rekreasi.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dalam masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan

berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK)

Asas - asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode.²⁵

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

jadi dalam membina narapidana lembaga pemasyarakatan harus memperhatikan asas – asas yang berlaku dengan berdasarkan Undang – undang.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tidak lagi sekedar mengandung aspek kepenjaraan belaka, tetapi juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yaitu pulihnya kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan.²⁶

Menurut Bambang Purnomo ada 2 pola untuk pembinaan Narapidana yaitu pembinaan di Lembags Pemasyarakatan yang meliputi pembinaan mental, fisik, keahlian serta finansial dan material yang dibutuhkan Narapidana agar

²⁵ Romli Atmasasmita, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, hal.12

²⁶ Departement kehakiman RI dan Hak Asasi Manusia, *Kebijaksanaan Strategi dan Pola Implementasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1999), hal.1

menjadi warga binaan yang baik dan berguna serta pembinaan yang diluar Lembaga Pemasyarakatan.²⁷ Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.01.PK.04.10 tahun 2007 ada 4 bentuk pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan yaitu "asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat". Pembinaan Narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan pada prinsipnya yaitu mengembalikan Narapidana atau reintegrasi kepada masyarakat agar terjalin suatu komunikasi yang baik sehingga bisa menunjang kembali Narapidana ke masarakat. Dari pengertian tersebut bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan proses pembinaan yang meliputi berbagai bentuk binaan yang dapat membantu Narapidana pada tujuan Lembaga Pemasyarakatan tersebut yaitu resosialisasi.

Pemidanaan yang bertujuan membina narapidana dalam Undang - undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di atur dalam Pasal 12 yang berbunyi :

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar : a. Umur; b. Jenis kelamin; c. Lama pidana yang dijatuhkan d. Jenis kejahatan e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pem binaan narapidana wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS wanita.

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan telah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna dimasyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan

²⁷ Bambang Purnomo.1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta.

anak didik pemasyarakatan. Pengertian Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup setara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu, tahap orientasi atau pengenalan. Dalam tahap ini narapidana di jaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk lembaga kemasyarakatan sampai $\frac{1}{3}$ masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini disebut tahap pengawasan maksimal (maximum security).
2. Tahap kedua yaitu, tahap Asimilasi dalam arti sempit. Pembinaan narapidana berlangsung dari $\frac{1}{3}$ sampai dengan $\frac{1}{2}$ masa pidananya. Apabila menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah cukup kemajuan, menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib maka narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih layak. Tahap ini merupakan pengawasan tidak begitu ketat (Medium security).
3. Tahap tiga yaitu, tahap asimilasi dalam arti luas. Proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama masyarakat luar, olah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi

pelaksanaan kegiatannya berada di bawah pengawasan dan bimbingan dan pinaan petugas lapas. Tahap ini narapidana pengawasan (Maximum security).

4. Tahap keempat yaitu tahap Integrasi dengan masyarakat. Proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada napi diberikan lepas-bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.²⁸

Bentuk pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan yang harus dilakukan oleh LAPAS telah diatur dengan jelas dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas pembinaan kepada narapidana, LAPAS tidak bekerja sendiri, namun dibantu oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai pembimbing, karena di BAPAS dapat diperoleh keterangan dan informasi bagi tiap warga binaan, untuk menentukan bentuk pembinaan. Bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana menurut Departemen Kehakiman meliputi :

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina;
- b. Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis;
- d. Pembinaan keperibadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual

Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan narapidana merupakan kewenangan menteri, melalui petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana. Hal tersebut sesuai dengan undang - undang No. 12 tahun 1995 pasal 7 ayat (1) yaitu pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas LAPAS. Selanjutnya dalam pasal 8 ditentukan

²⁸ Achmad S Soema Dipradja dan Romli, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, hlm 23-24

bahwa petugas LAPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Situasi dalam membina narapidana harus mempunyai iklim dan identik dengan iklim keluarga dimana ditemukan kedamaian dan keamanan.²⁹

C. Tinjauan Tentang Pemasyarakatan

1. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan dinegara-negara Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan Jhon Howard tentang kemanusiaan dan prinsip - prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana. Lalu diikuti oleh negara - negara Asia yang mengakui kemerdekaan dan hak asasi manusia dengan disemangati oleh asas kemanusiaan.³⁰

Pada umumnya Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat bagi Narapidana yang menjalani proses hukumnya setelah melalui proses persidangan. Menurut UU RI nomor 12 Tahun 1995 pada ketentuan umum ayat satu pasal 2 adalah :

“Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan suatu tatanan mengenal arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan di bina serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan”.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan ialah suatu lembaga , yang juga dahulu dikenal sebagai rumah penjara yakni tempat dimana orang – orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana – pidana

²⁹ Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta. hal 67

³⁰ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta :Liberty, Hlm 81 - 82

tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.³¹ berdasarkan pengertian tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat dibawah naungan Hukum dan HAM yang bertugas untuk membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan agar mereka tidak mengulangi kesalahannya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan sebagai bagian dari unsur penegak hukum. Lembaga pemasyarakatan satu - satunya instansi atau lembaga yang paling berhubungan langsung dengan pembinaan seorang pelanggar hukum, narapidana dan anak didik pemasyaraktan, maka sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan dalam hal ini sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan juga berperan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana yang dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sistem pemasyarakatan berisikan pedoman atau petunjuk didalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dengan tujuan agar mereka menyadari setiap kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga kembali hidup sebagai masyarakat yang baik. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3, UU No 12 Tahun 1995).

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan pembinaan dari Petugas Pemasyarakatan dengan aturan-aturan pemasyarakatan. Tujuan dan fungsi Lembaga

³¹ Tina Asmara, SH, M.H. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam sistem hukum indonesia*. Yogyakarta. Deepublish

Pemasyarakatan itu sendiri menurut Harsono bahwa "Meningkatkan kesadaran Narapidana akan eksistensinya sebagai Manusia". Pencapaian kesadaran dilakukan melalui tahap intropeksi, motivasi, self development. Kesadaran dimaksudkan agar Narapidana akan sebagai Manusia yang memiliki akal dan budi, yang memiliki budaya dan potensi sebagai makhluk spesifik. Sedangkan maksud intropeksi diri yaitu agar narapidana mengenal diri sendiri karena hanya dengan mengenal diri sendiri maka seseorang dapat merubah dirinya sendiri.³²

Di Indonesia sudah banyak sekali lembaga pemasyarakatan yang dibangun di daerah provinsi maupun kota atau kabupaten. Salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang yang ada di wilayah Jawa Timur. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang di bangun pada jaman Belanda tahun 1917, saat pemerintah Belanda membangun perumahan di daerah celaket Malang, di tempat inilah Hamid Roesdi mengawali karir menjadi sopir. Penjara ini telah mengalami pergantian tiga masa, yakni belanda, jepang dan kemerdekaan, pada saat masa Jepang tempat ini di gunakan sebagai tempat penampungan para pejuang kemerdekaan untuk di interogasi. Dan pada saat belanda memasuki malang tempat ini pernah di bakar oleh pejuang kemerdekaan hingga hanya menyisakan tembok penyekatnya saja, sampai sekarang Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang masih berfungsi sebagai penjara meskipun dekat sekali dengan perumahan penduduk.

Peraturan – peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyrakatan yaitu : UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP 31 th 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

³² *Ibid.*

2. Tinjauan Umum Narapidana

Secara umum pengertian Narapidana adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan menurut hukum dan harus dimasukkan ke dalam penjara. Menurut Ensiklopedia Indonesia "status Narapidana dimulai ketika terdakwa tidak lagi dapat mengajukan banding, pemeriksaan kembali perkara atau tidak ditolak permohonan grasi kepada presiden ataupun menerima keputusan hakim pengadilan". Status terdakwa menjadi status terhukum dengan sebutan napi sampai terhukum selesai menjalani hukuman penjara atau dibebaskan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Wilson mengatakan bahwa "Narapidana adalah Manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik".³³ Sedangkan, pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU 12/1995). Oleh karena itu, selama perkara tersebut masih menempuh proses peradilan dan berbagai upaya hukum selanjutnya, orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana; terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang buian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana, pengertian narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP).³⁴ Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang

³³ Dalam Adi Sujanto. 1995. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta. Hal. 34

³⁴ "Pengertian Narapidana dan terpidana" <http://www.contohnaskahdrama.com> di akses tgl 10/05/2018 jam 07.32

hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.³⁵ Meskipun seorang narapidana hilang kemerdekaannya, tetapi narapidana masih memiliki hak – hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan, hak-hak narapidana tersebut telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.”

3. Tinjauan Umum Lanjut Usia

Lansia adalah tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia dan ditandai oleh gagalnya seorang untuk mempertahankan kesetimbangan kesehatan dan kondisi stres fisiologis nya. Lansia juga berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup dan kepekaan secara individual.³⁶ Dari Pengertian Lansia secara umum, dapat kita simpulkan bahwa seseorang disebut lansia jika ia telah berusia 65 tahun ke atas. Namun, terdapat beberapa batasan-batasan umur yang mencakup batasan umur

³⁵ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual* , Surabaya, Target Press, hlm 53

³⁶“ Pengertian Lansia” <http://www.referensibebas.com/2016/03/> di akses tgl 10/05/2018 jam 09.03

orang yang masuk di dalam kategori lansia, diantaranya adalah 60 tahun (UU No. 13 Tahun 1998) dan 60-74 tahun (WHO).

Selain pengertian lansia secara umum diatas, terdapat juga beberapa pengertian lansia menurut para ahli. Usia lanjut juga dapat dikatakan sebagai usia emas karena tidak semua orang dapat mencapai usia lanjut tersebut, maka jika seseorang telah berusia lanjut akan memerlukan tindakan keperawatan yang lebih, baik yang bersifat promotif maupun preventif, agar ia dapat menikmati masa usia emas serta menjadi usia lanjut yang berguna dan bahagia.

Selain pengertian tadi, ada juga beberapa pengertian lansia menurut para ahli. Berikut ini beberapa pengertian lansia menurut beberapa ahli:³⁷

Pengertian Lansia Menurut Smith: Lansia terbagi menjadi tiga, yaitu: young old (65-74 tahun); middle old (75-84 tahun); dan old old (lebih dari 85 tahun). Pengertian Lansia Menurut Setyonegoro: Lansia adalah orang yang berusia lebih dari 65 tahun. Selanjutnya terbagi ke dalam 70-75 tahun (young old); 75-80 tahun (old); dan lebih dari 80 tahun (very old).

Pengertian Lansia Menurut UU No. 13 Tahun 1998: Lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Pengertian Lansia Menurut WHO: Lansia adalah pria dan wanita yang telah mencapai usia 60-74 tahun. Pengertian Lansia Menurut Sumiati AM: Seseorang dikatakan masuk usia lansia jika usianya telah mencapai 65 tahun ke atas.

Seperti yang telah di sebutkan tadi di atas, ada beberapa standar atau batasan orang di katakana lansia. Di sini kami menyebutkan batasan usia dari WHO, batasan lansia di indonesia dan menurut ahli. Batasan umur lansia menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) lanjut usia meliputi:

³⁷ “Pengertian Lanjut Usia menurut Ahli”, www.pengertianahli.id . (diakses 20/07/2018 jam 20.23)

1. Usia pertengahan (middle age), ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun.
2. Lanjut usia (elderly) = antara 60 sampai 74 tahun.
3. Lanjut usia tua (old) = antara 75 sampai 90 tahun.
4. Sangat tua (very old) = diatas 90 tahun.

Di Indonesia, batasan mengenai lanjut usia yaitu 60 tahun ke atas, dimana ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada Bab1 Pasal 1 Ayat 2. Menurut Undang- Undang tersebut di atas lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita.. Jadi apabila seseorang yang sudah berumur 60 tahun keatas bisa dikatakan sebagai lansia jika berdasarkan undang – undang no 13 tahun 1998.

